

Syariah Microfinance Institutions and Women-Based MSME Empowerment in an Efforts to Reducing Poverty (Study at KSPPS Baytul Ikhtiar Bogor)

Lembaga Keuangan Mikro Syariah dan Pemberdayaan UMKM Berbasis Perempuan dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan (Studi pada KSPPS Baytul Ikhtiar Bogor)



Sofi Maulidia
STEI SEBI
Bojongsari, Depok
sofimaulidia24@gmail.com

Mawardi Nur
STEI SEBI
Bojongsari, Depok
mawardi.nur@sebi.ac.id

DOI
<https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.485>

FOCUS

Journal of Social Studies

Vol. 3 No. 1
FEBRUARI
2022



Abstract

Poverty is a problem that has been rooted in society. One of the efforts to decrease a poverty is empower MSME through Microfinance Institutions because they can directly reach the grass root. This study aims to find out how the pattern and role of women-based MSME empowerment in poverty decrease efforts carried out by KSPPS Baytul Ikhtiar. The research method used is a qualitative method. The results of this study indicate that KSPPS Baytul Ikhtiar adopted a pattern of empowerment of the Grameen Bank which was modified in such a way with sharia principles. In addition, this study also shows that there are 4 main roles of KSPPS Baytul Ikhtiar in poverty alleviation efforts, providing access to capital, providing access to assistance, empowering women and her family.

Keywords: *women empowerment, MSME, poverty*

Abstrak

Kemiskinan merupakan masalah yang telah mengakar dalam masyarakat. Salah satu upaya mengurangi kemiskinan adalah dengan memberdayakan UMKM lewat Lembaga Keuangan Mikro karena dapat secara langsung menyentuh *grass root*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola dan peran pemberdayaan UMKM berbasis perempuan terhadap upaya mengurangi kemiskinan yang dilakukan oleh KSPPS Baytul Ikhtiar. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan KSPPS Baytul Ikhtiar mengadopsi pola pemberdayaan Grameen Bank yang dimodifikasi dengan sedemikian rupa dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga terciptalah model pemberdayaan perempuan dengan model Grameen Syariah. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan ada 3 peran utama KSPPS Baytul Ikhtiar dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu memberikan akses permodalan, memberikan akses pendampingan, dan memberdayakan perempuan serta keluarganya.

Kata kunci: pemberdayaan perempuan, UMKM, kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang telah mengakar dalam masyarakat, bukan hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia. Banyak program pengentasan kemiskinan yang telah digaungkan serta dilakukan, namun masih belum terlaksana dengan sempurna. Di sisi lain, sebagian besar masyarakat belum mengetahui bagaimana cara untuk memulai upaya mengurangi kemiskinan tersebut. Berbagai forum dari tingkat lokal hingga internasional, telah digelar untuk mengkaji perihal kemiskinan yang intinya hanya satu, yaitu bagaimana membebaskan manusia dari belenggu kemiskinan (Amalia, 2009).

Salah satu upaya mengurangi kemiskinan yang banyak dicetuskan adalah dengan memutus mata rantai kemiskinan lewat pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah). Pemilihan pemberdayaan UMKM sebagai upaya mengurangi kemiskinan bukanlah tanpa alasan, karena UMKM menjadi salah satu usaha yang tetap berdiri kokoh ketika krisis moneter melanda Indonesia pada tahun 1997-1998. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), jenis usaha ini tidak berkurang paska krisis moneter melanda Indonesia. Hal ini karena UMKM pada dasarnya merupakan bagian dari masyarakat yang mempunyai kemauan dan kemampuan untuk produktif (Wijono, 2005) serta bersifat kerakyatan (dalam arti usaha mayoritas rakyat).

UMKM juga menciptakan lapangan kerja lebih dari 90 persen dari total usaha nasional dan menyumbang sampai dengan 60 persen *output* yang dihasilkan usaha nasional pada sektor non migas. pada tahun 2018, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mencapai 64 juta unit yang berarti lebih dari 90 persen dari total seluruh usaha yang ada di Indonesia. Daya serap tenaga kerja yang cukup besar membuat UMKM memiliki dampak positif yang cukup besar pula untuk mengurangi pengangguran serta kemiskinan di Indonesia.

Namun, permasalahan yang cukup serius adalah ketiadaan modal dari sebagian besar UMKM, sebagai akibat dari rendahnya akses UMKM terhadap sumber permodalan, baik bank maupun non-bank karena dinilai *unbankable* (tidak memenuhi persyaratan bank) (Amalia, 2009). Akibatnya banyak para pelaku UMKM memutuskan meminjam uang kepada rentenir. Pengalaman lapangan menunjukkan mayoritas UMKM terjebak pada sistem *money lender* (rentenir) (Amalia, 2009). Sistem pinjam- meminjam uang pada rentenir dengan bunga yang cukup tinggi kerap digandrungi oleh masyarakat berekonomi lemah karena sistemnya yang sederhana dibandingkan meminjam uang pada bank maupun lembaga keuangan lainnya. Para pemberi modal (rentenir) memperoleh keuntungan dengan memberikan pinjaman dengan cara menetapkan bunga yang cukup tinggi dalam waktu yang sangat singkat, sehingga para debitur merasa sangat kesulitan dalam melunasi pinjaman (Arif, Muhammad Zainol, 2013).

Dalam islam sendiri ‘bunga’ pada dasarnya dilarang karena mengandung riba. Hal ini karena riba merupakan kegiatan eksploitasi dan tidak memakai konsep etika atau moralitas yang dapat menzalimi orang lain serta adanya unsur ketidakadilan (*unjustice*). Para ulama sepakat dan menyatakan dengan tegas tentang pelarangan riba (Setiawati, 2017). Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah solusi yang dapat berperan aktif untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Lembaga Keuangan Mikro Syariah dipandang sebagai salah satu solusi sekaligus jawaban untuk menyelesaikan masalah permodalan tersebut. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan mikro merupakan penyedia jasa keuangan bagi masyarakat yang memiliki usaha pada sektor paling kecil serta dapat secara langsung menyentuh *grass root* (masyarakat pada lapisan paling bawah) (Amalia, 2009) dan prinsip Syariah yang menerapkan konsep bagi hasil dengan prinsip keadilan, kemitraan, transparansi dan universal dinilai sebagai solusi yang tepat bagi upaya mengurangi kemiskinan di Indonesia.

Salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang turut andil dalam pemberdayaan UMKM dan upaya mengurangi kemiskinan adalah KSPPS Baytul Ikhtiar. KSPPS Baytul Ikhtiar merupakan sebuah lembaga keuangan mikro Syariah berbentuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan yang melakukan pola pemberdayaan



masyarakat melalui pelayanan keuangan mikro berbasis komunitas dengan pelayanan berbasis Syariah, yang fokus pada pemberdayaan perempuan miskin dan keluarganya.

KSPPS Baytul ikhtiar mengadopsi pola *Grameen Bank* dari Bangladesh yang dimodifikasi dengan sedemikian rupa dengan prinsip-prinsip Syariah, sehingga terciptalah model pemberdayaan perempuan dengan model *Grameen* Syariah. *Grameen Bank* merupakan suatu lembaga keuangan mikro yang menjadikan Perempuan sebagai target pemberdayaan karena di tengah masyarakat yang sebagian besar masih berlaku budaya patriarki, masalah gender masih menjadi persoalan besar. dalam hal ini, posisi perempuan umumnya berada pada pihak yang lebih lemah, sementara laki-laki mendominasi berbagai aspek dalam kehidupan. oleh karena itu, membahas kemiskinan dalam budaya tersebut, wanita adalah pihak yang paling rentan menerima dampak dari kemiskinan (Amalia, 2009). Dengan alasan tersebut, memberdayakan perempuan merupakan masalah yang urgent; dan inilah yang menjadi dasar model pemberdayaan *Grameen Bank* yang juga diyakini oleh KSPPS Baytul ikhtiar.

Yang menarik dari KSPPS Baytul Ikhtiar, bukan hanya tentang model pemberdayaan saja yang mengadopsi model pemberdayaan *Grameen Bank*, namun juga keberhasilan tingkat pengembalian pembiayaan para anggotanya yang mencapai lebih dari 90 persen (2019). Selain itu, terhitung pada tahun 2019, KSPPS Baytul Ikhtiar telah memiliki 20 kantor cabang yang tersebar di 6 wilayah, 44.900 orang anggota penerima manfaat, dengan total pembiayaan yang tersalurkan sebesar 166.5 Milyar Rupiah (KSPPS Baytul Ikhtiar).

Dari uraian tersebut, peneliti tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai program pemberdayaan yang dilakukan oleh KSPPS Baytul Ikhtiar serta peran KSPPS Baytul Ikhtiar dalam upaya mengurangi kemiskinan. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian yang berjudul *LKMS dan Pemberdayaan UMKM Berbasis Perempuan Dalam Upaya Mengurangi Kemiskinan” (Studi Pada KSPPS Baytul Ikhtiar Bogor)*.

Lembaga keuangan mikro (LKM) atau juga dikenal dengan sebutan *microfinance*, adalah sebuah lembaga penyedia jasa keuangan bagi para pengusaha kecil dan mikro serta sebagai salah satu alat pembangunan bagi masyarakat desa (Ledgerwood, 1999). Menurut (Thohari, 2003), Lembaga Keuangan Mikro adalah sebuah Lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi para pengusaha mikro serta masyarakat dengan penghasilan yang rendah, baik formal, semi formal, maupun informal. Dengan kata lain, LKM adalah Lembaga yang menyediakan jasa keuangan bagi para pengusaha mikro serta berpenghasilan rendah yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal (karena dinilai tidak dapat memenuhi persyaratan) dan telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis (Amalia, 2009).

Dengan demikian LKM memiliki ruang lingkup yang cukup luas, seperti jasa simpanan, jasa pembayaran dan memberikan pinjaman baik untuk kegiatan produktif usaha mikro maupun untuk kegiatan konsumtif keluarga masyarakat miskin, namun biasanya dikelola dengan cara yang sederhana. Pada umumnya jasa pinjaman yang dilakukan LKM berbentuk layanan pembiayaan (kredit) atau dalam bentuk pembiayaan lainnya. Pada dasarnya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) memiliki prinsip yang hampir sama dengan Lembaga Keuangan Mikro Konvensional. Namun perbedaannya terletak pada akad dan transaksinya, dalam LKMS tidak diperkenankan adanya bunga melainkan sistem *cost plus* dan *profit sharing* (bagi hasil). LKMS diharapkan dapat menggantikan instrumen bunga pada sistem konvensional dengan sistem bagi hasil (*profit sharing*) (Amalia, 2009).

Namun menurut Darsono dkk (2017) menyebutkan bahwa berdasarkan basis operasionalnya LKMS di Indonesia dibagi ke dalam 4 jenis, yaitu LKMS berbasis koperasi, perbankan, adat, dan lembaga daerah. LKMS berbasis koperasi.

LKMS tidak jauh berbeda dengan perbankan Syariah, LKMS merupakan lembaga intermediasi sebagaimana bank pada umumnya, akan tetapi bergerak di industri mikro, kecil dan menengah. Secara lembaga LKMS hampir sama dengan perbankan Syariah, maka produk dan jasa yang disediakan pun sama-sama beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Harapan terbesar dengan berkembangnya LKMS ini adalah menjadi satu solusi dalam membangun ekonomi umat Islam di Indonesia.

Peran LKMS dalam membangun ekonomi umat Islam yang pertama, *mengurangi kemiskinan*. Semua pemimpin di seluruh negara di dunia ketika menjabat pasti memiliki program tersendiri dalam meminimalisir kemiskinan di negaranya. Namun ke semua pemerintahan di dunia sepakat meyakini bahwa adanya keuangan

mikro dengan berbagai modelnya bisa menjadi strategi kunci sebagai obat atas penyakit kronis ini (Darsono, Sakti, Suryanti, Astiyah, dan Darwis, 2017: 27-28).

Kedua, *pemerataan distribusi untuk keadilan ekonomi masyarakat*. Sulitnya akses keuangan terhadap masyarakat lapisan bawah, terutama di perdesaan pelosok menyumbang jumlah masyarakat miskin terbanyak. Namun sejak lahirnya LKMS menjadikan masyarakat lapisan bawah sedikit lebih lega, karena akses mereka terhadap keuangan mulai terbuka. Secara tidak langsung, terbukanya akses keuangan terhadap masyarakat lapisan bawah menjadi suatu cara untuk mencapai pemerataan ekonomi. Sehingga, LKMS dapat menjadi penghubung antara kaum kaya dan kaum miskin atau dhuafa. Namun, tentunya evaluasi terhadap skala prioritas harus diperhatikan oleh LKMS agar tidak salah sasaran, seperti kelayakan nasabah dan jenis pembiayaan yang dilakukan (Amri, & Widyaningsih, tt: 14).

Ketiga, *mengembangkan UKM dan Memberdayakan masyarakat*. Di antara peran LKMS lainnya, peran yang satu ini menjadi fokus utama yang sedang digalakkan oleh pemerintah dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh pengusaha mikro. Di antaranya dengan menyediakan dana ataupun bantuan modal bagi pengusaha kecil, serta dilanjutkan pada tahap bimbingan dan penyuluhan baik berupa seminar-seminar, lokakarya maupun pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah dan bekerja sama dengan pihak LKMS (Sari, 2005, chap. 2).

Di Indonesia, skala bisnis dibagi menjadi empat tingkatan yaitu, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Penyebutan UMKM digunakan untuk menyebutkan ketiga skala bisnis selain usaha besar. Menurut Awalil Rizky (2008) usaha mikro adalah jenis usaha informal yang memiliki aset, modal, dan omset yang amat kecil. Ciri lain dari usaha ini adalah komoditi usahanya sering berganti, tempat usaha kurang tetap, sulit untuk dapat dilayani oleh perbankan karena dinilai *unbankable* dan umumnya tidak memiliki legalitas usaha (Rizky, 2008:50). Sedangkan menurut Undang-undang nomor 20 tahun 2008 menjelaskan bahwa Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria usaha kecil ini memiliki *asset* lebih dari 50 juta rupiah dengan omzet lebih dari 300 juta sampai 2,5 milyar rupiah. Dalam INPRES No. 10 tahun 1999 usaha menengah adalah unit kegiatan yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 200 juta sampai maksimal Rp 10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha).

Salah satu sebab kemiskinan adalah karena kurangnya pendapatan dan aset (*lack of income and assets*) untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, perumahan, tingkat kesehatan dan pendidikan yang dapat diterima (*acceptable*). Di samping itu kemiskinan juga berkaitan dengan keterbatasan lapangan pekerjaan dan biasanya mereka yang dikategorikan miskin (*the poor*) tidak memiliki pekerjaan (pengangguran), serta tingkat pendidikan dan kesehatan mereka pada umumnya tidak memadai (World Bank, 2004).

Pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Amalia, 2016).

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan pola serta peran KSPPS Baytul Ikhtiar dalam pemberdayaan UMKM

berbasis perempuan dalam upaya mengurangi kemiskinan (Sugiyono, 2017). Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kualitatif ekonomi, penelitian kualitatif ekonomi ditujukan pada fenomena yang menunjukkan pada tindakan subjek pelaku ekonomi, yakni manusia yang bertindak di seputar fenomena ekonomi seperti halnya dalam konsumsi, dalam produksi maupun dalam distribusi dengan segala macam *derivative* transaksi dan interaksinya (Sonny, 2013:62).

Teknik analisa data adalah menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data dan memilih mana yang penting serta mana yang perlu dipelajari dan menarik kesimpulan sehingga mudah dipahami (Sugiyono, 2007:333-345). Analisis data menurut Bogdan dalam Sugiyono yaitu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiyono, 2007). Analisis data kualitatif bersifat induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Pola pemberdayaan pada KSPPS Baytul Ikhtiar mengadopsi pola pelayanan kredit pada Grameen Bank dari Bangladesh yang dimodifikasi dengan prinsip syariah. Grameen Bank merupakan salah satu Lembaga keuangan Mikro di Bangladesh yang memberikan layanan keuangan mikro kepada golongan termiskin dari masyarakat yang sulit untuk mengakses lembaga keuangan formal karena dinilai *unbankable* (tidak memenuhi persyaratan bank) dengan tanpa agunan (jaminan). secara harfiah Grameen Bank berarti bank desa yang merupakan bank untuk orang-orang termiskin yang tinggal di daerah pedesaan.

Muhamad Yunus, seorang dosen Ekonomi dari universitas Chittagong, Bangladesh melalui proyek ‘Grameen Bank’, yaitu sebuah Lembaga Keuangan Mikro yang pemberdayaan masyarakat miskin terutama perempuan, telah berhasil menginspirasi jutaan orang terutama para pelaku UMKM dan penyedia jasa Lembaga Keuangan Mikro di dunia untuk mengadopsi dan menerapkan pola pembiayaan tersebut, termasuk Indonesia. Muhamad Yunus melalui pengembangan *mind-set* percaya, bahwa setiap manusia mempunyai *marketable skill*, dan potensi yang tidak terbatas termasuk *entrepreneurship*. Kemiskinan yang terjadi di negaranya tidak ditimbulkan oleh rasa malas atau minimnya keterampilan, melainkan kurangnya kesempatan dan kebijakan yang tidak berpihak pada mereka menjadi faktor utama hal tersebut terjadi (Nurhayati, 2016a).

Salah satu alasan Yunus mendirikan Grameen Bank adalah karena dihadapkan pada realita bencana kelaparan yang melanda Bangladesh tahun 1974. Peristiwa tersebut, membuat Yunus melakukan proyek penelitian (*field study*) dengan melibatkan para mahasiswanya di suatu daerah pedesaan di Bangladesh, yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata sebagai upaya mengurangi tingkat kemiskinan (Nurhayati, 2016b). Tujuan inilah yang mendorong Yunus meninggalkan ranah akademik menuju dunia Keuangan mikro. Dia mengembangkan konsep kredit mikro, yaitu model pinjaman skala kecil untuk kaum miskin yang tidak mampu meminjam uang dari bank umum, karena tidak memiliki jaminan dan dinilai *unbankable* (tidak memenuhi persyaratan bank). Gagasan ini membawanya menjadi bankir bagi kaum miskin terutama para perempuan. Hal yang dilakukan Muhamad Yunus dengan memberdayakan masyarakat miskin terutama perempuan menjadi salah satu upaya untuk membela hak-hak kaum perempuan yang termarginalkan, melawan kelambanan birokrasi, kekolotan sikap keagamaan, kekakuan pola pikir akademis, serta rasa kurang peduli lembaga keuangan yang ada (Nurhayati, 2016).

Kesimpulan yang ditarik Yunus dari penelitian yang dilakukannya yaitu satu, pada dasarnya *bank* tidak ingin berhubungan dengan orang miskin, orang buta huruf serta kaum perempuan. (Pandu Suharto, 1989:38). Tapi pada kenyataannya masyarakat Bangladesh saat itu memiliki tingkat kemiskinan dan buta huruf yang sangat tinggi. Sementara posisi kaum perempuan, sebagaimana juga terjadi dalam masyarakat patriarki lainnya pada saat itu, bukan posisi penentu, tapi diposisikan pada level subordinat. Bagi Yunus, seseorang tidak harus menunggu dipekerjakan orang lain untuk bekerja, namun harus tertanam dalam pikiran setiap orang bahwa mereka dapat

melakukan pekerjaannya sendiri, menjadi *self employment*. *Self employment* dinilai lebih menarik serta menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan *primer* terutama bagi kelompok yang termarginalkan seperti kaum wanita, kaum minoritas, serta mereka yang memiliki kekurangan fisik atau sosial. Mereka akan lebih nyaman dan leluasa dalam bekerja dari pada berada dalam bayang-bayang dipekerjakan orang lain. (Count, Alex. 2008: 341). Berkat keyakinannya, Yunus telah berhasil memberdayakan sekitar 6 juta wanita miskin, dengan memberikan pembiayaan tanpa agunan (Jaminan). Hal itu dilakukan karena menurut Muhamad Yunus dalam perbincangannya dengan manajer kantor cabang *Janata Bank* “Orang paling miskin di antara orang miskin bekerja dua belas jam sehari. Mereka perlu menjual sesuatu guna memperoleh penghasilan untuk dimakan. Oleh karena itu mereka sangat punya alasan untuk membayar kembali agar mendapat pinjaman lagi dan dapat melanjutkan hidup esok hari. Itu jaminan terbaik yang bisa anda dapatkan”. Hal tersebut tidak salah, karena tingkat pengembalian pembiayaan *Grameen Bank* mencapai lebih dari 98% (Yunus, Muhammad, 2007). Keberhasilan Yunus dalam menanggulangi masalah pengentasan kemiskinan melalui Lembaga Keuangan Mikro ‘*Grameen Bank*’ yang ia bangun dengan keberanian serta ketulusan hati telah membawanya meraih Nobel Perdamaian Dunia di tahun 2006 (Nurhayati, 2016:31). Muhamad Yunus dan “*Grameen Bank*” merupakan salah satu bukti peran penting Lembaga Keuangan Mikro terhadap pemberdayaan UMKM dan upaya mengurangi kemiskinan.

Menurut Syarif dkk. (2006) Pola kredit atau pinjaman yang diberikan oleh *Grameen Bank* berbeda dengan yang dilakukan oleh bank konvensional. hubungan bank dengan nasabah memiliki ikatan secara emosional yang kuat. Dimulai dengan penyuluhan, kemudian diadakan pendidikan (termasuk diajari membaca dan menulis), pengenalan usaha dan pelatihan. Selain itu sebagian besar nasabah merupakan orang-orang yang memiliki keterampilan di suatu bidang usaha, seperti pertanian, perdagangan, peternakan, dan kerajinan. Anggota yang memiliki keterampilan ini akan mengajari anggota yang lain, dan suatu kelompok akan mengajari kelompok yang lain (Amalia, 2016).



Gambar 1. Pola Penyaluran Kredit Grameen Bank
 Sumber: Data diolah oleh penulis

Transaksi dalam *Grameen Bank* sendiri berbeda dengan bank pada umumnya. Transaksi dibuat dengan pola yang sederhana, sehingga akan memudahkan masyarakat dari lapisan paling bawah untuk mengaksesnya. Penetapan bunga 20% per tahun didasarkan pada kebutuhan operasional bank. Dan untuk pengumpulan modal,

diberlakukan simpanan wajib sebesar 5% dari pinjaman anggota. Jika pembayaran pinjaman berjalan lancar maka jumlah pinjaman selanjutnya akan dinaikkan (Amalia, 2016).

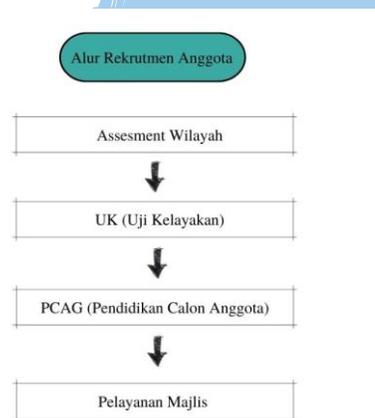
Keberhasilan Muhamad Yunus dalam mendirikan Grameen Bank menjadi inspirasi bagi berbagai Negara untuk mengadopsinya, termasuk KSPPS Baytul Ikhtiar. KSPPS Baytul Ikhtiar memiliki konsep yang sama dengan Grameen Bank, yaitu memberikan pelayanan keuangan mikro secara berkelompok kepada kaum perempuan tanpa agunan (jaminan) dengan sistem tanggung renteng. Sistem tanggung renteng merupakan suatu sistem di mana saat ada salah satu anggota yang tidak dapat menyetorkan angsurannya dalam suatu kelompok maka anggota lain akan membantu mengumpulkan dana bersama-sama untuk membantunya.

Namun KSPPS Baytul Ikhtiar tidak secara penuh mengadopsi peran tersebut. Pola Grameen Bank dimodifikasi menjadi Pola Grameen Syariah, yaitu modifikasi pola Grameen Bank dengan berpedoman kepada nilai-nilai Islam. Secara praktek konsep Grameen Bank dengan Grameen Syariah memiliki kemiripan dalam proses pelaksanaannya, namun ada hal yang membedakannya, perbedaan tersebut akan disajikan dalam bentuk tabel dibawah ini.

Tabel 1. Perbedaan Konsep Grameen Bank dengan Grameen Syariah

No	Aspek	Grameen Bank	Grameen Syariah
1	Keuntungan	Berdasarkan Bunga	Berdasarkan Prinsip Syariah (Bagi Hasil)
2	Hubungan	Debitsur-Kreditur	Kemitraan
3	Transaksi	Transaksi tidak diikat dengan akad apapun	Transaksi diikat dengan Akad Syariah
4	Pengawas	Tidak terdapat dewan sejenis	Diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah
5	Investasi	Tidak ada aturan khusus	Jenis usaha yang halal

Sumber: Diolah oleh penulis



Gambar 2. Alur Rekrutmen Anggota

Sumber: KSPPS Baytul Ikhtiar

1. Assesment Wilayah

Assesment wilayah atau penentuan wilayah pemberdayaan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang telah diputuskan sebagai indikator kemiskinan, antara lain, sulitnya akses terhadap keuangan mikro bahkan cenderung tertutup, tingkat pendidikan yang rendah, tingkat kematian balita dan ibu melahirkan yang tinggi, dan sebagainya (Syukur, Wawancara Pribadi, 26 Juli 2021).

2. Uji Kelayakan Calon Anggota (UK)

Pada tahap ini, pihak koperasi akan mengunjungi/bertemu calon anggota koperasi untuk memastikan para calon anggota telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota koperasi. Syarat tersebut antara lain:

a. Perempuan dan Telah Menikah

Tujuan utama dari program ini adalah untuk memberdayakan para perempuan miskin yang telah menikah, hal ini bukanlah tanpa alasan melainkan karena perempuan umumnya berada pada pihak yang lebih lemah, sementara laki-laki mendominasi berbagai aspek dalam kehidupan. Oleh karena itu, membahas kemiskinan dalam budaya tersebut, wanita adalah pihak yang paling rentan menerima dampak dari kemiskinan. Dengan alasan tersebut, memberdayakan perempuan merupakan masalah yang *urgent*. Hal tersebut yang menjadi dasar model pemberdayaan yang mengutamakan perempuan (dalam keluarga) miskin sebagai “kelompok sasaran”. Hal tersebut juga didasari oleh beberapa hal, yaitu (Amalia, 2016):

1) Dari segi ketenagakerjaan

Umumnya kaum perempuan dipandang bukan sebagai kaum produktif. Mereka lebih banyak di posisi sebagai ibu rumah tangga yang tidak berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Padahal jika disadari mereka sebenarnya dapat menjadi salah satu pilar ekonomi keluarga. Salah satunya adalah dengan membuka akses kredit kepada mereka sehingga mereka dapat melakukan usaha produktif disela-sela kegiatan mengurus rumah tangga sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Pada saat yang sama, kaum ibu juga perlu didampingi untuk terus mengatur keuangannya melalui manajemen tabungan, dengan hal ini para ibu akan terlatih untuk mengatur keuangannya dengan baik.

2) Secara kultural

Pentingnya pemberdayaan bagi kaum perempuan juga terkait dengan hubungan perempuan dengan keluarga. Secara kultural, kaum perempuan telah terbiasa mengurus rumah tangga, karena merekalah yang secara langsung bertanggung jawab terhadap konsumsi keluarga. Oleh karena itulah, berbicara tentang pemberdayaan kaum miskin erat kaitannya dengan pemberdayaan kaum perempuan yang langsung membidik penyangga keluarga.

3) Secara emosional

Dalam praktik kehidupan, kaum perempuan (ibu) lebih dekat dengan anak-anak. Oleh karena itu, perempuan menjadi kunci penentu terhadap pembentukan kualitas sumber daya anak-anak bangsa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di masa depan, baik dalam hal perbaikan nutrisi, kesehatan, maupun pendidikan. Maka tidak berlebihan jika perempuan perlu di berdayakan, dengan demikian perbaikan kualitas anak-anaknya pun secara langsung dapat ditingkatkan, di KSPPS Baytul Ikhtiar juga terdapat program yang bernama tabungan pendidikan, banyak para Ibu yang menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menyekolahkan anaknya hingga tahap perguruan tinggi, bahkan ada seorang ibu yang dari awal menabung hanya untuk menyekolahkan anaknya di salah satu PTN di Kota Bogor (Syukur, Wawancara Pribadi, 26 Juli 2021).

b. Lulus secara administratif

Tahap Administratif adalah salah satu tahapan dasar para calon anggota. Dokumen-dokumen yang diminta seputar kelengkapan data berupa KK, KTP, dsb. Pada tahap ini juga akan dilakukan analisis kelayakan pengajuan peminjaman atau pembiayaan dengan indikator indeks rumah, penghasilan, *asset* rumah tangga, serta kemampuan menabung dari setiap keluarga (Syukur, Wawancara Pribadi, 26 Juli 2021).

c. Mendapatkan persetujuan dari suami

Persetujuan dari suami merupakan hal yang penting dan menjadi syarat mutlak KSPPS Baytul Ikhtiar. Hal itu karena, para perempuan yang di berdayakan harus tetap menghormati suaminya sebagai kepala keluarga. Pemberdayaan yang dilakukan bukan dijadikan sebagai senjata untuk melawan suaminya melainkan sebagai alat untuk menyejahterakan keluarga (Syukur, Wawancara Pribadi, 26 Juli 2021).

d. Wajib mengikuti pendidikan calon anggota

Pendidikan calon anggota menjadi pintu gerbang diterima atau tidaknya para calon anggota, sekaligus menjadi alur terakhir dalam proses rekrutmen anggota. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada uraian di bawah ini.

3. Pendidikan Calon Anggota (PCAG)

Pendidikan anggota koperasi diikuti oleh para calon anggota koperasi yang telah mendaftar dan lulus pada tahap pemberkasan. Kegiatan ini dilakukan selama 3 hari dengan tujuan mempersiapkan para calon anggota koperasi untuk menerima pembiayaan. Kegiatan ini diisi dengan berbagai kegiatan antara lain (Syukur, Wawancara Pribadi, 26 Juli 2021):

a. Pertemuan Blok (PB)

Difokuskan pada peningkatan pemahaman informasi mengenai praktik muamalah (akad syariah). Isu mengenai bank emok, menjadi krusial sehingga anggota harus dapat membedakan antara KSPPS BAIK dengan lembaga keuangan yang disebut bank emok tersebut.

Materi yang diberikan pada pertemuan ini meliputi masalah kelembagaan, proses pelayanan keuangan, pemahaman terhadap akad syariah, literasi keuangan, motivasi berkelompok dan perkoperasian.

Pelaksanaan kegiatan pertemuan blok di beberapa cabang di kombinasi dengan kegiatan sosial seperti pemberian santunan dan bantuan peralatan prasarana tempat ibadah. Kegiatan ini juga sebagai bagian dari proses mensosialisasikan program lembaga kepada aparaturn setempat, tokoh masyarakat, dan para ulama sehingga keberadaan KSPPS dapat bermanfaat bukan hanya bagi anggota melainkan juga bagi masyarakat sekitar.

b. Pendidikan Dasar Perkoperasian (PDP)

Pendidikan dasar perkoperasian diadakan sebagai bentuk kewajiban koperasi pada anggotanya. Materi pendidikan dasar perkoperasian yang diberikan masih pada tema-tema dasar tentang koperasi. Melalui materi-materi yang diberikan harapannya anggota tahu dan paham atas hak dan kewajibannya sebagai anggota koperasi.

4. Penerimaan Anggota dan Pelayanan Majelis (Pertemuan Pekan).

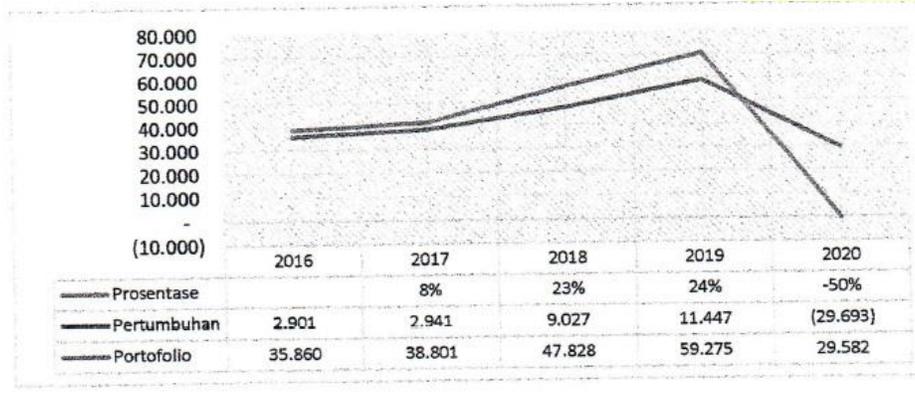
Setelah melalui pendidikan calon anggota selama 3 hari, barulah diputuskan apakah calon anggota tersebut dapat diterima atau tidak. Jika diterima, maka setiap anggota diwajibkan untuk mengikuti pertemuan majelis setiap pekan sekali. Satu majelis/kelompok terdiri dari 15 sampai dengan 20 orang dan akan didampingi oleh satu orang TPL (Tenaga Pendamping Lapangan). Nantinya, TPL akan bertugas untuk membimbing para calon anggota untuk menerima pembiayaan, mengawasi dan melakukan program pemberdayaan kepada masing-masing majelis seperti pelatihan literasi keuangan, perencanaan usaha anggotanya, dsb. Dalam satu hari, setiap TPL biasanya akan melakukan pelayanan majelis antara 6 sampai dengan 7 kelompok (Syukur, wawancara pribadi, 26 juli 2021).

Pembiayaan yang diinginkan oleh setiap anggota disampaikan saat pertemuan majelis dilakukan dan harus diketahui oleh seluruh anggota. Anggota boleh memberi saran atau tidak menyetujui jumlah pembiayaan atau pinjaman yang diajukan karena pengembalian bersifat tanggung renteng, yang mana jika si peminjam tidak bisa mengembalikan, maka anggota kelompok yang lain harus ikut bertanggung jawab untuk mengembalikan (Anisa, Wawancara Pribadi Agustus 2021).

Pemberian pembiayaan dilakukan dengan pola 5-5, artinya dalam setiap kelompok yang terdiri dari 10 orang, pencairan akan dilakukan sebanyak 2 kali, untuk 5 orang pertama, lalu seminggu kemudian 5 orang selanjutnya. Pinjaman atau pembiayaan berkisar antara 300.000-500.000 rupiah, sedangkan pembiayaan berkisar antara 500.000 rupiah sampai dengan 20.000.000 rupiah dengan bertahap, mempertimbangkan disiplin kehadiran, disiplin angsuran, dan disiplin tabungan wajib. Jangka waktu pengembalian adalah 50 Minggu. (Anisa, Wawancara Pribadi, Agustus 2021).

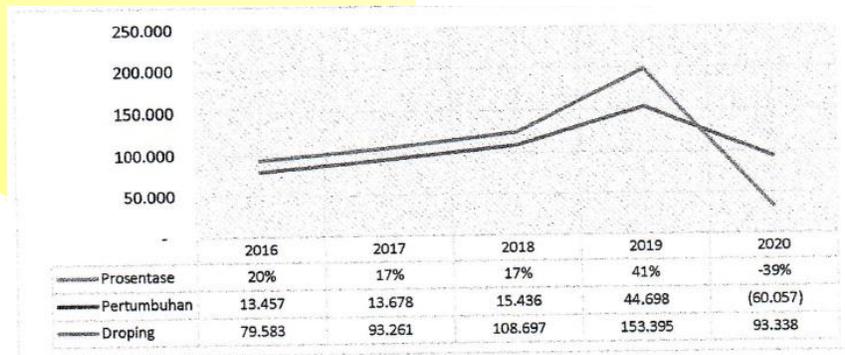
Program pemberdayaan juga dilakukan saat pertemuan majelis, seperti pelatihan pencatatan laporan keuangan, atau perencanaan keuangan yang dibimbing langsung oleh TPL. Selain itu, KPPS juga bekerja sama dengan lembaga eksternal untuk mengadakan pendampingan, seperti dengan ILO, yang akan melakukan pendampingan serta konsultasi mengenai bisnis yang dimiliki oleh anggota (Syukur, Wawancara Pribadi, 26 Juli 2021).

1. Penyaluran Pembiayaan



Gambar 3. Pertumbuhan Portofolio Dropping KSPPS BAIK 2016-2020
 Sumber: RAT KSPPS Baytul Ikhtiar 2020

Portofolio *dropping* merupakan permohonan pencairan dana dari para anggota koperasi. Berdasarkan laporan data portofolio *dropping* tahun 2016-2020, Hampir setiap tahun, nilai portofolio *dropping* KSPPS Baytul Ikhtiar mengalami kenaikan sejalan dengan jumlah anggotanya yang juga bertambah. Dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 8%, dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 23%, dan puncaknya pada tahun 2018 ke tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 24%. Namun dari tahun 2019 ke tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 50%, hal ini disebabkan pandemi covid-19 yang memberikan dampak terhadap hampir seluruh sektor, termasuk sektor ekonomi, sehingga banyak penyesuaian yang dilakukan oleh KSPPS Baytul Ikhtiar mengenai efisiensi terhadap proyeksi bisnis berupa efisiensi beban dan biaya, pembiayaan terhadap anggota serta menunda kegiatan yang bersifat pertemuan langsung. Kebijakan lainnya adalah pemberian keringanan angsuran anggota dengan restrukturisasi dan relaksasi. Perpanjangan masa angsur disesuaikan dengan kapasitas setiap anggota sampai pada proses hapus buku (Write off) terkhusus bagi anggota yang akhirnya kehilangan bisnisnya karena tidak dapat bertahan di tengah Pandemi Covid-19.

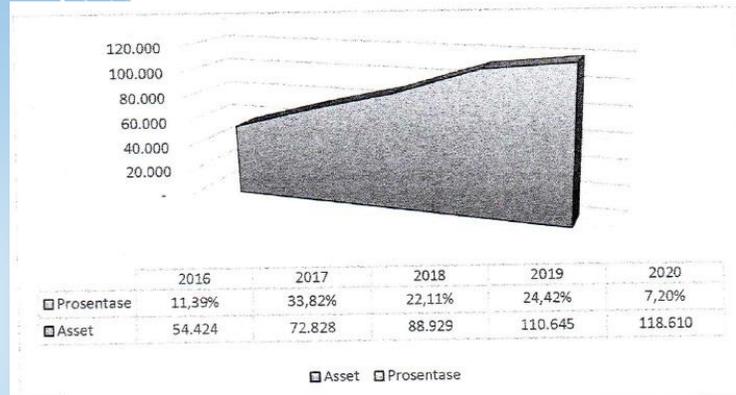


Gambar 4. Pertumbuhan Nominal Dropping KSPPS BAIK 2016-2020
 Sumber: RAT KSPPS Baytul Ikhtiar 2020

Nominal dropping merupakan jumlah keseluruhan pembiayaan yang diberikan oleh KSPPS BAIK kepada para anggotanya. Dilihat dari data di atas, sama seperti *portofolio dropping*, pertumbuhan Nominal *dropping* juga mengalami kenaikan setiap tahunnya kecuali dari tahun 2019 ke tahun 2020. Jumlah pembiayaan tertinggi yang

dikeluarkan adalah pada tahun 2019 yaitu lebih dari 153 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2020, nominal *droping* mengalami penurunan sebesar 39%, berada di kisaran 93 miliar rupiah.

2. Pertumbuhan Asset dan Anggota



Gambar 5. Pertumbuhan Asset KSPPS BAIK 2016-2020
Sumber: RAT KSPPS Baytul Ikhtiar 2020

Dilihat dari data di atas, selama 5 tahun terakhir jumlah *asset* KSPPS BAIK mengalami kenaikan setiap tahunnya. Dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 33,82% yang semula memiliki *asset* sebesar lebih dari 54 miliar rupiah naik menjadi lebih dari 72 miliar rupiah. Pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 22,11% menjadi lebih dari 88 miliar rupiah. Pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 24,42% menjadi lebih dari 110 miliar rupiah, dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 7,20% menjadi lebih dari 118 miliar rupiah. Kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 33,82% dan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 7,20%.

Tabel 2. Pertumbuhan Anggota per-cabang KSPPS BAIK 2016-2020

No	Cabang	2016	2017	2018	2019	2020
1	Tamansari	3394	3220	3154	3153	2712
2	Ciampea	3307	3146	3071	3089	2726
3	Kota Bogor	3293	2925	3071	2943	2759
4	Cicurug	2967	2577	2635	2558	2107
5	Dramaga	3646	3282	3282	3409	3105
6	Pamijahan	2640	2503	2503	2486	2331
7	Cibadak	2199	2043	2146	2739	2460
8	Bandung (KBB)	2939	2596	2113	2164	1960
9	Cisaat	2618	2673	2479	2571	2007
10	Cugenang	2128	2074	2226	2511	1884
11	Warung Kondang	2349	2116	2182	2335	2024
12	Cipanas	2145	2302	2246	2471	2055
13	Leuwisadeng	3061	2660	2831	3114	2658
14	Pasir Wangi	2308	2336	2808	3296	2625
15	Sukaraja			297	1605	1389
16	Cikajang			680	2116	1958
17	Pangatikan				864	988
18	Cireunghas				1092	1372
19	Cikalong Kulon				384	122
20	Sukarja Tasikmalaya					364
21	Sariwangi Tasikmalaya					146
	Jumlah	38994	36453	37724	44900	39752

Sumber: RAT KSPPS BAIK 2020 (data diolah oleh penulis)

Menurut data di atas, selama 5 tahun terakhir jumlah anggota KSPPS Baytul Ikhtiar mengalami fluktuasi. Di tahun 2016 ke tahun 2017 sempat mengalami penurunan anggota sebanyak 2.541 orang, namun di tahun-tahun selanjutnya terus mengalami kenaikan kecuali pada tahun 2020, terjadi penurunan anggota yang cukup signifikan, yaitu sebesar 5.148 orang dengan berbagai macam alasan yang akan dijelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. Jumlah Anggota Keluar dan Alasannya

No	Keterangan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Meninggal	223	194	165	232	264
2	Pindah Alamat	803	813	590	661	439
3	Karakter	2305	3673	2893	2165	979
4	Kerja (Mendapat Pekerjaan)	1908	1927	993	1256	271
5	Majlis Bubar	613	975	801	1017	825
6	Saving Menurun	396	744	544	501	1103
7	Sakit	275	368	386	162	176
8	Tidak setuju keputusan lembaga	75	82	56	116	322
9	Tidak diizinkan suami lagi	568	630	640	839	1047
10	Kondisi Keluarga	172	235	111	122	105
11	Pindah kelembagaan lain	82	99	79	76	153
12	Usia/Jompo				231	303
13	Pembiayaan bermasalah				616	2845
14	Usaha sudah berkembang				14	30
15	Batal Pembiayaan				41	71
16	Tidak mau kumpulan				158	240
17	Cerai					15
18	Tidak Punya Waktu					271
Total		7420	9740	7258	8207	9459

Sumber: RAT KSPPS Baytul Ikhtiar 2020 (data diolah oleh penulis)

Data di atas menunjukkan jumlah anggota yang keluar dalam 5 tahun terakhir beserta alasannya. Jumlah anggota yang keluar tidak sama dengan jumlah penurunan anggota pada tabel sebelumnya. Hal ini karena jumlah penurunan anggota merupakan gabungan dari jumlah anggota baru yang masuk di kurang jumlah anggota yang keluar.

Tabel 4. Analisis Pertumbuhan Anggota Masuk dan Keluar 2016-2020

Tahun	Jumlah Anggota	Anggota Keluar	Anggota Masuk	Presentase Penurunan	Presentase Kenaikan
2016	38,994	7,240	7,488	18.57 %	19.20 %
2017	36,453	9,740	4,699	26.72 %	12.89 %
2018	37,724	7,258	11,011	19.24 %	29.19 %
2019	44,900	8,207	14,434	18.28 %	32.15 %
2020	39,752	9,459	3,059	23.80 %	7.70 %

Sumber: RAT KSPPS BAIK 2020 (data diolah oleh penulis)

Tabel di atas menjelaskan jumlah anggota yang masuk dan keluar selama 5 tahun terakhir. Jumlah anggota keluar paling tinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 26,72% atau sebanyak 9.740 orang, dan jumlah anggota masuk terbanyak terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 32,15% atau sebanyak 14.434 orang.

3. Kualitas Portofolio at Risk (PAR)/Non Performing Financing (NPF)

Tabel 5. Portofolio of Risk/Non Performing Financing (NPF) KSPPS BAIK 2016-2020

No	Keterangan	Portofolio				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pinjaman Lancar	31,533	36,032	31,612	38,299	50,212
2	Tertunggak 1-30 hari	1,456	469	466	704	532
3	Tertunggak 31-60 hari	29	142	88	158	133
4	Tertunggak 61-90 hari	16	83	59	90	76
5	Tertunggak 91-120 hari	20	40	44	52	46
6	Tertunggak di atas 120 hari	43	59	64	80	56
	Total	33,097	36,825	32,333	39,383	51,055

Sumber: RAT KSPPS Baytul Ikhtiar 2020 (data diolah oleh penulis)

Data di atas menampilkan portofolio lancar dan tidak lancar selama 5 tahun terakhir. Untuk portofolio tidak lancar sendiri dibagi menjadi 5 kategori, yaitu tertunggak 1-30 hari, 31-60 hari, 61-90 hari, 91-120 hari, dan lebih dari 120 hari.

Tabel 6. Nilai Outstanding PAR KSPPS BAIK 2016-2020

No	Keterangan	Outstanding				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pinjaman Lancar	37,701,589,854	44,364,909,142	54,049,233,450	74,355,507,818	53,332,471,836
2	Tertunggak 1-30 hari	1,132,961,820	333,634,273	358,905,444	861,587,350	2,840,552,432
3	Tertunggak 31-60 hari	11,298,000	105,324,542	86,004,417	157,667,999	1,594,914,283
4	Tertunggak 61-90 hari	9,176,000	58,341,573	59,284,380	95,910,711	1,277,771,792
5	Tertunggak 91-120 hari	13,690,000	29,112,000	46,316,000	49,604,000	1,314,638,227
6	Tertunggak di atas 120 hari	27,744,000	53,243,326	71,968,426	90,874,236	2,835,140,068
	Total	38,896,459,674	44,944,564,856	54,671,712,117	75,611,152,114	63,195,488,638
	PAR	0.16%	0.55%	0.48%	0.52%	11.11%

Sumber: RAT KSPPS Baytul Ikhtiar 2020 (data diolah oleh penulis)

Data di atas menampilkan mengenai nilai Portofolio of Risk koperasi BAIK selama 5 tahun terakhir. Dari tahun 2016 sampai tahun 2019 nilai PAR berada di bawah angka 1%, hal ini berarti lebih dari 90% anggotanya berhasil membayar kembali pinjaman atau pembiayaannya yang telah diberikan. Namun, pada tahun 2020 tingkat PAR naik di angka 11%, hal tersebut merupakan dampak dari pandemi covid-19 yang terjadi (Syukur, wawancara pribadi, 26 juli 2021).

4. Pembiayaan PASS

**AKUMULASI DROPIING PRODUK PEMBIAYAAN AIR DAN SANITASI SYARIAH (PASS)
TAHUN 2020**

NO	NAMA CABANG	DROPIING		OUTSTANDING	ANGSURAN MASUK	
		NOMINAL	PF		POKOK	MARGIN
1	Pusat	2.460.000	6	246.000	2.214.000	486.000
2	Ciampea	220.320.000	121	120.532.800	99.787.200	25.917.550
3	Sadeng	93.670.000	53	58.786.600	34.883.400	9.798.600
4	Pamijahan	103.270.000	55	50.875.800	52.394.200	13.462.300
5	Kota Bogor	82.310.000	49	44.009.000	38.301.000	10.503.100
6	Tamansari	88.620.000	54	40.300.548	48.319.452	13.083.362
7	Dramaga	344.510.000	163	222.020.016	122.489.984	33.823.991
8	Sukaraja	14.060.000	8	8.712.000	5.348.000	1.374.500
9	Garut Pasirwangi	101.630.000	92	46.570.502	55.059.498	15.239.057
10	Garut Cikajang	33.410.000	39	18.163.600	15.246.400	4.558.100
11	Garut Wanaraja	24.490.000	43	11.205.800	13.284.200	4.469.300
12	Cicurug	105.980.000	57	58.035.000	47.945.000	12.117.500
13	Cibadak	67.860.000	44	29.472.820	38.387.180	10.255.650
14	Cisaat	40.200.000	33	19.310.511	20.889.489	5.456.778
15	Geger Bitung	40.380.000	37	28.454.400	11.925.600	3.267.900
16	Cugenang	117.440.000	56	56.889.000	60.551.000	15.370.250
17	Warung Kondang	114.630.000	49	64.348.428	50.281.572	13.510.370
18	Cipanas	54.670.000	109	26.894.400	27.775.600	9.087.400
19	Cikalong Kulon	3.000.000	2	80.000	2.920.000	730.000
20	Bandung	148.390.000	126	62.191.400	86.198.600	23.215.900
21	Tasik Sukaraja	17.145.000	20	13.476.100	3.668.900	518.725
22	Tasik Sariwangi	6.700.000	8	5.873.800	826.200	233.550
TOTAL		1.825.145.000	1.224	986.448.525	838.696.475	226.479.883

Gambar 6. Akumulasi Dropping Produk PASS 2020
Sumber: RAT KSPPS Baytul Ikhtiar

Data di atas menampilkan jumlah pembiayaan PASS yang dikeluarkan pada tahun 2020. Total pembiayaan yang diberikan mencapai 1.825.145.000 rupiah yang dialokasikan pada produk-produk di bawah ini.

REALISASI DROPIING PRODUK PASS BERDASARKAN ALOKASI

NO	ALOKASI	NOMINAL	PF	RASIO	
1	Sumur Bor dengan Penampungan Air	18.000.000	5	17%	13%
2	Sumur Gali dengan Pompa Tangan	82.000.000	37	16%	52%
3	Sambungan Air RT	114.800.000	69	67%	35%
4	Sanitasi	377.855.000	96		
5	Renovasi Kamar Mandi	773.990.000	297		
6	Toilet Dengan Septic Tank	49.450.000	23		
7	Water Filter	291.100.000	638		
8	Penampungan Air	87.500.000	45		
9	Air dan Sanitasi	30.450.000	14		
TOTAL		1.825.145.000	1.224	100%	100%

NO	KATEGORI	NOMINAL	PF	RASIO	
1	Akses Air	302.300.000	156	17%	13%
2	Water Filter	291.100.000	638	16%	52%
3	Sanitasi	1.231.745.000	430	67%	35%
TOTAL		1.825.145.000	1.224	100%	100%

Sumber: RAT KSPPS Baytul Ikhtiar 2020

5. Capaian dan Kolaborasi/Kerja sama
a. Capaian



Gambar 8. Penghargaan dari Kementerian Koperasi
Sumber: Company Profile KSPPS Baytul Ikhtiar

Capaian yang pernah didapat oleh KSPPS Baytul Ikhtiar salah satunya adalah dari Kementerian Koperasi sebagai 100 koperasi terbaik di Jawa Barat pada tahun 2019. Dengan indikator *Portofolio of Risk, Non Performing Financing*, jumlah anggota serta kelengkapan dokumen seperti Laporan RAT (Rapat Akhir Tahun).

b. Kolaborasi/Kerja sama

Dalam menjalankan kegiatan operasional, KSPPS bekerja sama dengan berbagai lembaga, baik lembaga keuangan maupun non-keuangan. Untuk memenuhi kebutuhan modal kerja, KSPPS Baytul Ikhtiar mendapatkan fasilitas pembiayaan dari beberapa lembaga keuangan antara lain, BNI Syariah Cabang Fatmawati, Bahana Artha Ventura dengan program Ultra Mikro (UMI), LPDB, BJB Syariah Cabang Bogor, KSPPS Tadbiirul Ummah, Baitul Maal Bogor, dsb.

Sedangkan dalam memperkuat Organisasi, KSPPS BAIK juga menjalankan kerja sama dengan pihak non-keuangan, antara lain:

1. Inovasi Sigma Perkasa, Konsultan yang membantu dalam membangun *system SDM (HRD)*;
2. Konsultan audit internal dalam rangka membuat sistem operasional prosedur audit internal;
3. Kerja sama penyaluran bantuan perlindungan kepada lansia sebagai aksi tanggap darurat melindungi lansia dari wabah virus covid-19 dengan *Adventist development relief agency (ADRA)*;
4. Program fasilitasi *workshop/diskusi* terbatas pengembangan dan organisasi dengan fasilitator bapak Mulayadih, s.hut.
5. PT. Asky, dalam kegiatan penyaluran bantuan hibah dalam bentuk asuransi jiwa (Taawun card) untuk anggota di kabupaten Sukabumi dan Cianjur.
6. Menerima magang dari sekolah Informatika Bina Generasi (IBG)
7. Menerima Penelitian Dari :
 - a. Universitas Ibnu Khaldun
 - b. Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI (STEI SEBI) Depok
 - c. Perguruan Tinggi Teknologi dan Pariwisata Citra Buana Indonesia, Sukabumi

- d. Mahasiswa Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Djuanda
- e. Institut Pertanian Bogor
- f. Audit Laporan Keuangan

Sebagai bentuk dari akuntabilitas laporan keuangan yang disajikan, maka KSPPS BAIK menunjuk Kanaka Puradireja Suhartono untuk memeriksa laporan keuangan tahun buku 2020. Kerja sama ini sudah memasuki tahun ketiga, kantor akuntan publik yang ditunjuk juga merupakan kantor akuntan publik rekanan dari perbankan umum syariah yang memberikan fasilitas pembiayaan model kerja. ILO yang membantu KSPPS Baytul Ikhtiar untuk melakukan program pendampingan serta konsultasi bisnis bagi para anggotanya.

6. Hasil Observasi Lapangan

- a. Dari informasi yang penulis dapatkan serta hasil observasi yang dilakukan, para anggota mayoritas berasal dari lapisan paling bawah dalam masyarakat (*grass root*). Hal ini dibuktikan dari keterangan para anggota bahwa sebelum mendapatkan pembiayaan sangat sulit bagi mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dan tambahan modal menjadi harapan baru bagi mereka untuk dapat menghasilkan penghasilan guna memenuhi kehidupan mereka.
- b. Setiap kelompok memiliki *performing* (kinerja) yang berbeda. Saat peneliti turun ke lapangan dan melakukan observasi, pada proses pengembalian pembiayaan tidak semua anggota dapat dengan lancar mengembalikan pembiayaan tepat waktu, terjadi kredit macet di beberapa kelompok, ada beberapa anggota juga yang mengajukan penundaan pembayaran angsuran karena pandemi yang terjadi sehingga usahanya mengalami kemunduran.
- c. Dari informasi yang peneliti dapatkan dan observasi yang peneliti lakukan, Kegiatan kunjungan kebanyakan diisi dengan agenda *sharing* antara TPL dan anggota. Hubungan TPL dan anggota cukup dekat, saat pertemuan mingguan dilakukan, para anggota kebanyakan akan bercerita mengenai kesusahannya, tentang usaha yang mereka lakukan, keadaan desa sekitar, maupun masalah rumah tangga yang sedang mereka hadapi kepada TPL.
- d. Masih banyak anggota yang tidak dapat membedakan antara koperasi syariah dengan rentenir yang memberikan pinjaman di Desanya. Mereka menganggap bahwa semuanya sama. sama-sama memberikan pinjaman mikro kepada mereka dan harus mereka bayar setiap Minggunya. Mereka tidak mengetahui perbedaannya secara pasti.
- e. banyak anggota yang melakukan *double* pembiayaan di lembaga lain. Saat peneliti turun ke lapangan ada beberapa anggota yang tidak hanya mendapatkan pembiayaan dari Koperasi BAIK saja, namun juga dari koperasi atau lembaga keuangan mikro lain dalam waktu yang bersamaan, menurut pengakuan mereka hal ini tidak masalah asalkan mereka dapat membayar kembali.
- f. Saat peneliti melakukan observasi, wilayah anggota yang menerima pembiayaan jauh dari akses kendaraan umum. Selain itu masih banyak warga sekitar yang berprofesi sebagai petani atau melakukan usaha di bidang agribisnis, seperti sawah dan kebun.

Pembahasan

Dari hasil analisis di atas dan wawancara serta observasi yang peneliti lakukan peran KSPPS Baytul Ikhtiar dalam memberdayakan UMKM Berbasis Perempuan dalam upaya mengurangi kemiskinan antara lain:

1. Memberikan Akses Permodalan

Salah satu peran KSPPS yang paling utama adalah memberikan akses permodalan kepada para anggotanya, di sini KSPPS menjalankan dua peran, yaitu:

a) *Banking of the poor*

Bentuk ini mendasarkan diri pada *saving led microfinance*, yaitu mobilisasi keuangan mendasarkan diri dari kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat miskin itu sendiri. Bentuk ini juga berdasar pada *membership base*, di mana keanggotaan dan partisipasinya terhadap kelembagaan mempunyai makna yang penting. *Banking of the poor* menekankan pada aspek pendidikan bagi masyarakat miskin, serta melatih kemandirian (Ismawan, 2006). Oleh karena itu, para anggota dilatih untuk bisa menyisihkan uangnya guna ditabung dan dapat dipakai dimasa sulit. Peran ini dapat tercermin dari produk-produk tabungan yang dimiliki oleh KSPPS Baytul Ikhtiar. KSPPS Baytul Ikhtiar bukan hanya menyediakan jasa keuangan mikro untuk para anggotanya, namun juga mengajarkan para anggotanya untuk mandiri dalam mengelola perencanaan keuangannya dengan baik.

b) *Banking for the poor*

Bentuk ini mendasarkan diri atas *credit led institution*, dimana sumber dari *financial support* utama bukan diperoleh dari mobilisasi tabungan masyarakat miskin, namun diperoleh dari sumber lain yang memang ditujukan untuk masyarakat miskin. Dengan demikian, tersedia dana cukup besar yang memang ditujukan kepada masyarakat miskin melalui kredit. Contoh bentuk ini adalah: Badan Kredit Desa (BKD), Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), Grameen Bank, ASA, dan lain-lain (Ismawan, 2006).

Selain dari tabungan para anggotanya, KSPPS Baytul Ikhtiar juga menerima sumber permodalan dari berbagai pihak eksternal guna memenuhi sumber permodalannya. Hal ini karena KSPPS Baytul Ikhtiar memberikan pembiayaan atau pinjaman bukan hanya kepada para anggota yang telah memiliki usaha, namun juga kepada para anggota yang baru memulai usahanya. Jadi, memiliki usaha bukanlah syarat mutlak untuk menerima pembiayaan, bahkan kebanyakan para anggota baru memulai usaha saat bergabung dengan KSPPS Baytul Ikhtiar (Syukur, wawancara pribadi, 26 juli 2021).

Peran KSPPS Baytul Ikhtiar dalam memberikan akses sumber permodalan diakui oleh ibu IR yang bertempat tinggal di Desa Sukmajaya dan memiliki usaha pakaian. Pada awalnya ibu IR berjualan pakaian dengan cara keliling, namun setelah menerima pembiayaan, ibu IR telah memiliki kemampuan untuk menyewa ruko untuk berjualan. Ibu IR juga menyebutkan bahwa pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS Baytul Ikhtiar telah membantunya dalam sisi permodalan (Studi Dokumentasi, 12 Agustus 2021).

Hal yang sama juga diakui oleh Ibu NH yang telah bergabung selama 10 tahun dengan KSPPS Baytul Ikhtiar. Ibu NH yang awalnya hanya mendapat pinjaman sebesar 300.000 rupiah sekarang sudah berada pada platform pinjaman mencapai 10.000.000 rupiah. Pada awalnya, Ibu NH mengaku hanya berjualan gorengan, namun kini telah memiliki 3 jenis usaha, yaitu toko kelontong, pangkalan pasir dan depot galon (Studi Dokumentasi, 12 Agustus 2021).

Selain itu ibu SR, AH, AM juga mengakui hal yang sama, pembiayaan yang dilakukan sangat bermanfaat bagi permodalan usaha mereka dan keluarganya. Contohnya Ibu AH, Ibu AH mengajukan pembiayaan sebagai modal untuk suaminya berjualan bunga. Ibu AH mengaku sangat sulit jika harus meminjam kepada tetangganya, oleh karena itu adanya Koperasi sangat membantu usaha keluarga Ibu AH.

Konsistensi peran KSPPS Baytul Ikhtiar dalam memberikan akses terhadap sumber permodalan dapat dilihat dari pertumbuhan jumlah pembiayaan yang digulirkan setiap tahunnya yang telah dibahas dalam bab analisis data.

Tidak hanya jumlah alokasi pembiayaan yang terus naik, peran KSPPS BAIK untuk terus memberikan akses sumber permodalan juga dibuktikan dari jumlah anggota yang terus bertambah setiap tahunnya.

2. *Memberikan Akses Pendampingan Usaha*

Tujuan utama dari KSPPS Baytul Ikhtiar bukan hanya memberikan pinjaman/pembiayaan bagi para anggotanya namun juga untuk memberdayakan anggotanya, oleh karena itu KSPPS BAIK juga memiliki program pendampingan usaha bagi para anggotanya yang berupa pelatihan-pelatihan seperti pelatihan

membuat laporan serta perencanaan keuangan maupun konsultasi (konseling) mengenai usaha guna meningkatkan kualitas usaha para anggota yang biasanya dilakukan pada pertemuan majelis. Di beberapa kesempatan, KSPPS BAIK juga bekerja sama dengan lembaga eksternal seperti ILO untuk melakukan pendampingan usaha para anggotanya.

Diakui oleh Ibu ES yang bergerak dalam bidang usaha kue kering dan telah bergabung selama 18 tahun dengan KSPPS Baytul Ikhtiar, bahwa KSPPS Baytul Ikhtiar telah memberikan kesempatan kepadanya untuk mendapatkan pendampingan usaha oleh ILO dalam bentuk pelatihan dan konseling yang mana sangat bermanfaat bagi usaha yang dijalankannya (Studi Dokumentasi, 12 Agustus 2021).

3. Memberdayakan Para Perempuan dan keluarganya

Peran selanjutnya adalah memberdayakan para perempuan dan keluarganya. Menurut Amalia (2016), pemberdayaan adalah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Ini berarti, masyarakat di berdayakan agar dapat melihat, dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan-pilihan (Bariadi, dkk, 2005:53).

Dengan konsep tersebut di atas, untuk keluar dari kemiskinan masyarakat perlu di berdayakan agar memiliki kekuasaan dan kemampuan untuk dapat melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Konsep inilah yang sejalan dengan visi dan misi dari KSPPS BAIK. Pada umumnya, perempuan berada pada pihak yang lebih lemah, sementara laki-laki mendominasi berbagai aspek dalam kehidupan. Dari segi ketenagakerjaan, umumnya kaum perempuan dipandang bukan sebagai kaum produktif. Mereka lebih banyak diposisikan sebagai ibu rumah tangga yang tidak berhubungan dengan kegiatan ekonomi. Padahal jika disadari mereka sebenarnya dapat menjadi salah satu pilar ekonomi keluarga. Salah satunya adalah dengan membuka akses pembiayaan kepada mereka sehingga mereka dapat melakukan usaha produktif disela-sela kegiatan mengurus rumah tangga sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Pada saat yang sama, kaum ibu juga perlu didampingi untuk terus mengatur keuangannya melalui manajemen tabungan, dengan hal ini para ibu akan terlatih untuk mengatur keuangan keluarganya dengan baik.

Selain itu, dari segi kultural, pentingnya pemberdayaan bagi kaum perempuan juga terkait dengan hubungan perempuan dengan keluarga. Secara kultural, kaum perempuan telah terbiasa mengurus rumah tangga, karena merekalah yang secara langsung bertanggung jawab terhadap konsumsi keluarga. Oleh karena itulah, berbicara tentang pemberdayaan kaum miskin erat kaitannya dengan pemberdayaan kaum perempuan yang langsung membidik penyangga keluarga.

Secara emosional, dalam praktek kehidupan, kaum perempuan (ibu) lebih dekat dengan anak-anak. Oleh karena itu, perempuan menjadi kunci penentu terhadap pembentukan kualitas sumber daya anak-anak bangsa sebagai sumber pertumbuhan ekonomi di masa depan, baik dalam hal perbaikan nutrisi, kesehatan, maupun pendidikan. Dengan dukungan ilmu tentang pentingnya pendidikan dan kesehatan, dapat mengeluarkan keluarganya dari kemiskinan struktural. Maka tidak berlebihan jika perempuan perlu di berdayakan, dengan demikian perbaikan kualitas anak-anaknya pun secara langsung dapat ditingkatkan. Di KSPPS Baytul Ikhtiar,

banyak para Ibu yang menyisihkan sebagian penghasilannya untuk menyekolahkan anaknya hingga tahap perguruan tinggi, bahkan ada seorang ibu yang dari awal menabung hanya untuk menyekolahkan anaknya di salah satu PTN di Kota Bogor (Syukur, Wawancara Pribadi, 26 Juli 2021).

Dengan konsep-konsep pemberdayaan di atas, KSPPS menanamkan rasa percaya diri bagi para perempuan bahwa mereka mampu untuk membuat pilihan terkait dengan hal tersebut dalam hidupnya (Syukur, Wawancara Pribadi, 26 Juli 2021). Hal ini diwujudkan lewat program tabungan berencana, KSPPS BAIK mendorong para anggotanya untuk memiliki kesadaran terhadap pentingnya melakukan *savings* (simpanan) dan perencanaan keuangan dalam hidup mereka. Bukan hanya dari segi ekonomi, KSPPS juga menekankan pentingnya akses pendidikan dan kesehatan lewat diadakannya tabungan pendidikan, ibu hamil dan program PASS. Hal ini karena indikator kemiskinan bukan hanya faktor ekonomi, namun rendahnya pendidikan dan kurang sadarnya pada akses kesehatan terutama untuk ibu hamil, serta abai pada akses air bersih dan sanitasi juga merupakan indikator kemiskinan (BPS).

Hal tersebut dapat dilihat dari nominal Alokasi pada sektor pendidikan, kesehatan, serta air dan sanitasi cukup tinggi. hal ini membuktikan adanya kesadaran dari para anggota tentang pentingnya hal tersebut bagi kehidupan mereka.

No	Keterangan	Periode	
		2019	2020
1	Modal Kerja	75.400.371.000	55.151.267.000
2	Investasi / Asset	18.161.720.000	8.009.920.000
3	Pendidikan	20.382.264.000	16.810.925.000
4	Perumahan	28.094.350.000	10.298.073.000
5	Kesehatan	3.940.790.000	1.094.875.000
6	Air bersih dan sanitasi	6.763.474.000	1.844.385.000
7	Lain-lain	652.080.000	179.475.000
Total		153.395.049.000	93.388.920.000

Gambar 9. Dropping Berdasarkan Alokasi
Sumber: KSPPS Baytul Ikhtiar

PENUTUP

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Pola pemberdayaan yang dilakukan oleh KSPPS Baytul Ikhtiar adalah pola pembiayaan berkelompok dengan sistem tanggung renteng yang menysasar perempuan miskin dan keluarganya sebagai target pembiayaan dengan konsep Grameen Bank yang dimodifikasi dalam bentuk syariah. Konsep Grameen Syariah merupakan modifikasi pola layanan kredit mikro Grameen Bank di Bangladesh dalam bentuk Syariah berupa pembiayaan, pendampingan usaha, dan pemberdayaan, dengan mengganti sistem bunga dengan sistem bagi hasil yang sesuai dengan akad-akad syariah. Perempuan dipilih sebagai target pemberdayaan karena memberdayakan perempuan akan menciptakan efek air terjun (*cascading effect*) yang bermanfaat bagi seluruh keluarga karena secara kultural, kaum perempuan telah terbiasa mengurus rumah tangga, mereka secara langsung bertanggung jawab terhadap konsumsi keluarga dan secara emosional kaum perempuan (Ibu) lebih dekat dengan anak-anak. Maka tidak berlebihan jika perempuan perlu di berdayakan, dengan demikian perbaikan kualitas anak-anaknya pun secara langsung dapat ditingkatkan.

- 2) Tidak hanya pembiayaan usaha, KSPPS juga memiliki program tabungan berencana, serta pembiayaan air dan sanitasi (PASS) guna mendorong para perempuan dan keluarganya untuk berdaya agar dapat keluar dari kemiskinannya, karena kemiskinan bukan hanya masalah ekonomi, namun juga mengenai pendidikan, kesehatan, dan sanitasi yang lebih baik. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan secara garis besar, ada 3 peran utama KSPPS Baytul Ikhtiar dalam upaya pengentasan kemiskinan, yaitu, Memberikan Akses Permodalan kepada para anggotanya, Memberikan Akses Pendampingan Usaha, Memberdayakan perempuan serta keluarganya.

Sesuai dengan topik pembahasan skripsi ini tentang Pola Pemberdayaan dan Peran KSPPS Baytul Ikhtiar dalam pemberdayaan UMKM Berbasis Perempuan dalam Upaya mengurangi Kemiskinan, maka penulis menitikkan beberapa masukan yaitu, diharapkan kepada pengelola KSPPS Baytul Ikhtiar untuk lebih aktif dalam melakukan pelatihan-pelatihan berupa pencatatan keuangan sederhana sebagai sarana untuk memperkuat daya saing para UMKM, karena hal tersebut yang menjadi permasalahan besar bagi para UMKM, karena sering kali uang pribadi dan uang hasil usaha tercampur sehingga dapat memperlambat kemajuan usaha.

Selain itu, penulis juga berharap pihak KSPPS BAIK lebih aktif memberikan edukasi mengenai perbedaan lembaga keuangan mikro syariah dengan lembaga keuangan mikro konvensional serta “rentenir”, karena studi lapangan memperlihatkan masih banyak anggota yang belum mengetahui perbedaan koperasi syariah, “bank emok” dengan “rentenir”.

Acknowledgement

Penulis ingin berterima kasih atas segala dukungan dari seluruh pimpinan dan civitas akademika Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI, KSPPS Baytul Ikhtiar yang telah membantu pelaksanaan penelitian, para dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta arahan sehingga riset ini bisa berjalan dan selesai sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, E. (2009). *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Rajawali Press.
- Amalia, E. (2016). *Keuangan Mikro Syariah*. Gramata Publishing.
- Arif, Muhammad Zainol, S. (2013). Praktek Rentenir Penghambat Terwujudnya Sistem Hukum Perbankan Syariah di Kabupaten Sumenep. “*Performance*” *Bisnis Dan Akuntansi*., 3(2), 64.
- Ledgerwood, J. (1999). *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspectif*. The World Bank.
- Muhammad. (2005). *Manajemen Bank Syariah*. UPP AMPY YKPN.
- Nurhayati. (2016). Social Entrepreneurship Muhammad Yunus"Grameen Bank". *Bisnis, Management Dan Perbankan*, 2(1), 47.
- Nurhayati. (2016). Social Entrepreneurship Muhammad Yunus"Grameen Bank". *Bisnis, Management Dan Perbankan*, 2(1), 31.



- Setiawati, F. (2017). Riba Dalam Pandangan Al-Qur'an dan Hadis. *Al INTAJ Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.*, 3(2).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.*
- Thohari, E. (2003). *Peningkatan Aksebilitas Petani Terhadap Kredit Melalui LKM.* IPB Press.
- Wijono, W. W. (2005). *Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro Sebagai Salah Satu Pilar Sistem Keuangan Nasional: Upaya Konkret Memutus Mata Rantai Kemiskinan.* *Kajian Ekonomi Dan Keuangan Indonesia*, 1. www.mag.co.id. (n.d.). *Konsep dan Mekanisme Lembaga Keuangan Syariah.*
- Yunus, Muhammad, J. A. (2007). *Bank Kaum Miskin.* Margin Kiri.